

# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



**DINAS**  
**PENDIDIKAN**  
KABUPATEN SINJAI

**TAHUN**  
**2018-2023**

## KATA PENGANTAR

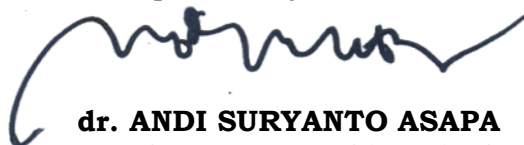
Rencana Strategis (Renstra) Urusan Pendidikan Tahun 2018-2023 yang ditangani oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai pada Tahun 2018, merupakan perencanaan jangka menengah yang dijadikan acuan pelaksanaan program kerja pembangunan Bidang Pendidikan. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang tidak terlepas dari dokumen perencanaan pada tingkat Kabupaten berupa RPJMD maupun pada tingkat provinsi dan tingkat pusat.

Sejalan dengan review internal terhadap Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renstra Dinas Pendidikan terdahulu, maka dilakukan perbaikan agar Renstra Dinas Pendidikan dapat sejalan dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sinjai. Renstra ini berisikan tentang pendahuluan, gambaran pelayanan OPD, isu-isu strategis berdasarkan tupoksi, penyajian visi, misi, tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD, penutup, dan lampiran. Renstra 2018-2023 ini merupakan proses pembangunan 5 tahunan yang tidak terlepas dari proses pembangunan pada Urusan Pendidikan pada tahun-tahun sebelumnya sehingga secara keseluruhan berisikan program dan kegiatan lanjutan. Penyusunan Renstra ini didasarkan kepada :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023.
2. Renstra Dinas Pendidikan terdahulu.
3. Cascading Kinerja Dinas Pendidikan sebagai salah satu hasil review internal.
4. Serta Dokumen pendukung lainnya.

Semoga Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018–2023 ini menjadikan arah proses pembangunan Pendidikan di Kabupaten Sinjai lebih terarah.

Sinjai, 27 Mei 2019  
Plt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Sinjai,



**dr. ANDI SURYANTO ASAPA**  
Pangkat : Pembina Tingkat I  
NIP : 19600502 199803 1 001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Renstra Dinas Pendidikan atau Rencana Strategis Dinas Pendidikan adalah merupakan satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan Dinas Pendidikan dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Bupati dan Wakil Bupati.

Ini bermakna bahwa perencanaan daerah selain diharapkan memenuhi kaidah penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel; konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (*sense of ownership*) menjadi aspek yang perlu diperhatikan, Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya.

Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai, tentunya berkewajiban menyusun Rencana Strategis yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan yang mengacu pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 , dan bersifat indikatif. Bersifat indikatif berarti informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen Renstra ini hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku.

Sesuai dengan tugas pokok Dinas Pendidikan Sinjai yakni membantu Bupati dalam Menyelenggarakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Pendidikan, maka pada proses perencanaan perlu melibatkan berbagai pihak atau *stakeholders*, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam program-program yang dirumuskan dan

pemanfaatan hasil-hasilnya, melalui proses perencanaan pembangunan daerah yang lebih bersifat partisipatif.

Bersifat partisipatif dimaksudkan untuk mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat ( keterlibatan semua pihak) tanpa membedakan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, baik dalam perencanaan penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan.

Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pendidikan dimaksudkan untuk mendorong semua lapisan masyarakat yang terkait dengan pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik sebagai konseptor, pengambil kebijakan, pelaksana. untuk lebih eksis meningkatkan peran sertanya dalam pembangunan. Peningkatan kualitas dan peran serta pada semua aspek kehidupan baik secara langsung atau tidak langsung dilakukan melalui penciptaan situasi-situasi yang kondusif sebagai motivator dan akselerasi proses pembangunan.

Dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah ( RPJMD ) Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 dimaksudkan mencari pemecahan solusi antisipatif terhadap kebutuhan daerah untuk masa 5 tahun mendatang. Dan pada dasarnya Renstra disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) dan juga merupakan upaya untuk mengarahkan semua sumber daya yang dimiliki termasuk sumber daya lainnya ( swasta ) untuk terlibat di dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang ada dan untuk mencapai tujuan pembangunan yang sudah ditetapkan.

Dalam kaitan tersebut di atas, Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai perlu memperhatikan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan prinsip *good governance* yang diakomodasikan menjadi suatu standar penilaian kinerja pemerintahan. Prinsip *good governance* ini telah menjadi nilai-nilai

universal dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023.

Dengan demikian, kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai di masa datang dapat pula diukur dari kemampuan kelembagaan dan sumberdaya manusia aparatur dalam mewujudkan nilai-nilai *good governance* secara nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Sejalan dengan pokok-pokok kebijakan dan arah pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sinjai, Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, perlu menyusun Rencana Strategis (RENSTRA). Hal ini penting mengingat Renstra merupakan acuan implementatif bagi seluruh aparat Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Rencana strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai ini memuat visi, misi Bupati dan Wakil Bupati dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta perumusan strategi yang mencakup perumusan kebijaksanaan, program dan kegiatan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renstra OPD ini meliputi landasan hukum yang bersifat umum dan teknis. Landasan hukum yang secara umum menjadi pedoman penyusunan Renstra OPD meliputi :

- 1) Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
Dalam pasal 150 Undang-undang nomor 32 tahun 2004 dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi:

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah;
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah;
- Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Selanjutnya dalam pasal 151 dinyatakan bahwa OPD menyusun Renstra yang selanjutnya disebut Renstra OPD, memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai

dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM daerah yang bersifat indikatif.

- 2) Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2004 pasal 3 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian / Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan penjelasan pasal 5 ayat (2) Undang-undang nomor 25 tahun 2004, RPJM daerah juga merupakan Renstra Daerah. Dalam pasal 7 Undang-undang ini juga mengamanatkan bahwa setiap OPD diwajibkan untuk menyusun Renstra OPD.

- 3) Peraturan Daerah Nomor ... Tahun ..... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 – 2023.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sinjai Tahun 2018 - 2023 menyediakan suatu pedoman resmi bagi seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Sinjai dalam menentukan prioritas program dan kegiatan. RPJMD juga merupakan pedoman untuk menyusun Renstra Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) , Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (renja OPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD) Kabupaten Sinjai.

- 4) Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai ( Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 41 )

Adapun landasan hukum yang lebih bersifat teknis, meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 )
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 )
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586 )
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi/Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM)
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008

Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864 )

11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941 )
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410 )
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
15. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Komersial Anak;
16. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Pekerjaan Terburuk Bagi Anak;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Renstra OPD Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai adalah untuk mewujudkan visi dan mengemban misi yang



berorientasi pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara lebih optimal untuk dipedomani ke depan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang diamatkan oleh RPJMD 2018 -2023.

Tujuan umum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai tahun 2018-2023 ini adalah untuk memberikan kejelasan arah dan sasaran pembangunan Pendidikan di Kabupaten Sinjai yang selanjutnya dijadikan acuan bagi seluruh pihak yang akan melakukan pembangunan pada bidang Pendidikan di wilayah Kabupaten Sinjai dalam upaya mendukung Visi Sinjai yaitu “**TERWUJUDNYA MASYARAKAT SINJAI YANG MANDIRI, BERKEADILAN DAN RELIGIUS MELALUI PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN BERDAYA SAING**”.

Adapun tujuan khusus penyusunan Renstra ini adalah :

1. Menjadikan Renstra sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai
2. Mengembangkan dan meningkatkan sinergitas antar bidang lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai dalam rangka fasilitasi pembangunan bidang Pendidikan
3. Memudahkan para stakeholder dan instansi terkait melakukan langkah-langkah adaptatif terhadap lingkungan strategis yang selalu berubah;
4. Mengembangkan dan meningkatkan komunikasi di antara stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan bidang Pendidikan Kabupaten Sinjai

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

## **BAB I Pendahuluan**

Berisi tentang latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

## **BAB II Gambaran Umum Pelayanan Dinas Pendidikan**

### **Kabupaten Sinjai**

Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Berisi uraian tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Sumber Daya Dinas Pendidikan, Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan.

## **BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Pendidikan**

Berisi Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan, Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati Sinjai dan Wakil Bupati Sinjai, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Penentuan Isu-isu Strategis

## **BAB IV Tujuan dan Sasaran**

Berisi uraian ringkas tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023.

## **BAB V Strategi dan Arah Kebijakan**

Berisi uraian tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Pendidikan dalam lima tahun mendatang

## **BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**

Berisi uraian Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

## **BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Berisi uraian indikator kinerja Dinas Pendidikan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang (2018-2023)

**LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Dinas Daerah Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sinjai, yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 tentang Susunan organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, maka kedudukan Dinas Pendidikan Sinjai adalah merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Struktur, Fungsi dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut:

**1. Kepala Dinas;**

**2. Sekretariat**

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan administrasi teknis dan administrasi penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas pokok sebagai dikmaksud pada ayat 1 menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan program dan anggaran pada Dinas
  - b. Pelaksanaan Program dan Anggaran

- c. Pengorganisasian tugas pada Dinas dan memberikan pelayanan administrasi pada bidang-bidang lain Dinas
  - d. Penyusunan bahan dokumentasi dan statistik, peraturan perundang – undanga, pengelolaan bahan bacaan dan penyelenggaraan kemitraan dengan masyarakat
  - e. Penyusunan Data, evaluasi penyiapan laporan pelaksanaan program kerja kepada Kepala Dinas
  - f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumahtangga
  - g. Penyelenggaraan pengelolaan Naska Dinas dan Kearsipan
  - h. Pelaksanaan pembinaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas dan
  - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok, organisasi guna mendukung kinerja Organisasi
- Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub bagian Program
  - b. Sub bagian Keuangan
  - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian

(3) Bidang Sekolah Dasar

Bidang Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Bidang Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan, perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang pelayanan pendidikan jenjang Sekolah Dasar.

Bidang Sekolah Dasar terdiri dari 3 seksi yaitu:

- a. Seksi kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar
- b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar
- c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar

Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang Kurikulum dan penelitian, Kelembagaan

dan Sarana prasarana, serta peserta didik dan Pembangunan karakter sekolah dasar;

- b. Pembinaan Pelaksanaan dibidang Kurikulum dan Penilaian, Kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik pembangunan karakter sekolah dasar;
- c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum mutan lokal Sekolah Dasar ;
- d. Menyusun bahan penerbitan izin pendirian, Penataan, dan Penutupan Sekolah Dasar;
- e. Penyusunan Bahan Pembinaan Kurikulum dan Penilaian, Kelembagaan dan Sarana Prasarana, serta Peserta didik dan Pembangunan karakter sekolah Dasar;
- f. Penyusunan bahan pembinaan Bahasa dan Sastra Daerah yang penuturnya lam daerah Kabupaten;
- g. Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan kaeakter Sekolah Dasar;
- h. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar; dan
- i. pelaksanaan tugas laian yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

(4) Bidang Sekolah Menengah Pertama

Bidang Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan, perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang pelayanan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama.

Bidang ini terdiri dari 3 seksi yaitu:

- a. Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama

- b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
- c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama

Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang Kurikulum dan penelitian, Kelembagaan dan Sarana prasarana, serta peserta didik dan Pembangunan karakter sekolah sekolah menengah pertama;
- b. Pembinaan Pelaksanaan dibidang Kurikulum dan Penilaian, Kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
- c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum mutan lokal Sekolah Menengah Pertama ;
- d. Menyusun bahan penerbitan izin pendirian, Penataan, dan Penutupan Sekolah Menengah Pertama;
- e. Penyusunan Bahan Pembinaan Kurikulum dan Penilaian, Kelembagaan dan Sarana Prasarana, serta Peserta didik dan Pembangunan karakter sekolah Menengah Pertama;
- f. Penyusunan bahan pembinaan Bahasa dan Sastra Daerah yang penuturnya dalam daerah Kabupaten;
- g. Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan kaeakter Sekolah Menengah Pertama;
- h. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah Menengah Pertama; dan
- i. pelaksanaan tugas laian yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

(5) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Non formal dipimpin oleh Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Non formal, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal terdiri atas 3 Seksi yaitu:

- a. Seksi Kurikulum dan Penilaian
- b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
- c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

(2) Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang Kurikulum dan penilaian, Kelembagaan dan Sarana prasarana, serta peserta didik dan Pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- b. Pembinaan Pelaksanaan kebijakan dibidang Kurikulum dan Penilaian, Kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- c. Penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan Non Formal;
- d. Penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, Penataan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;



- e. Penyusunan Bahan Pembinaan Kurikulum dan Penilaian, Kelembagaan dan Sarana Prasarana, serta Peserta didik dan Pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- f. Pengelolaan Data Pokok Pendidikan;
- g. Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan kaeakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- h. Pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik yang pembangunan karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, dan;
- i. pelaksanaan tugas laian yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi

#### (6) Bidang Pembinaan Ketenagaan

Bidang Ketenagaan dipimpin oleh Kepala Bidang Ketenagaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ketenagaan yang meliputi pendidik dan tenaga kependidikan.

Bidang Ketenagaan terdiri atas 3 Seksi yaitu:

- a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
- b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar
- c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah Pertama

(2) Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak

usia dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Non Formal;

- b. Penyusunan bahan kebijakan di bidang Pembinaan Pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Non Formal;
- c. Penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan pendidikan Non Formal;
- d. Penyusunan bahan pembinaan pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan pendidikan Non Formal;
- e. Penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten;
- f. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan pendidikan Non Formal;
- g. Pelaporan dibidang pembinaan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan pendidikan Non Formal; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

(7) Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Pelaksana melaksanakan tugas melakukan kegiatan dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan terkait dengan jabatan fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Kelompok jabatan fungsional terbagi dalam berbagai kelompok jabatan

fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang jenjangnya paling tinggi pada satuan kerja di lingkungan Dinas.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINJAI

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN  
FUNGSIONAL

SEKRETARIS

SUBAG  
PROGRAM

SUBAG  
KEUANGAN

SUBAG UMUM &  
KEPEGAWAIAN

BIDANG SEKOLAH DASAR

BIDANG SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA

BIDANG PENDIDIKAN ANAK  
USIAN DINI DAN

BIDANG PEMBINAAN  
KETENAGAAN

SEKSI KURIKULUM &  
PENILAIAN

SEKSI KURIKULUM &  
PENILAIAN

SEKSI KURIKULUM &  
PENILAIAN

SEKSI PTK PAUD &  
PENDIDIKAN  
NONFORMAL

SEKSI KELEMBAGAAN &  
SARANA PRASARANA

SEKSI KELEMBAGAAN  
& SARANA PRSARANA

SEKSI KELEMBAGAAN  
& SARANA PRASARANA

SEKSI PTK  
PENDIDIKAN DASAR

SEKSI PESERTA DIDIK &  
PEMBANGUNAN  
KARAKTER

SEKSI PESERTA DIDIK  
& PEMBANGUNAN  
KARAKTER

SEKSI PESERTA DIDIK  
& PEMBANGUNAN  
KARAKTER

SEKSI PTK  
PENDIDIKAN SMP

KELOMPOK JABATAN  
FUNGSIONAL

## a. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi baik antar unit organisasi dalam Dinas maupun dengan perangkat daerah lainnya.

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris untuk mewakili dan apabila Sekretaris berhalangan maka dapat menunjuk salah satu Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan substansi kegiatan yang diwakilkan.

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1 Kepegawaian

Jumlah Karyawan	: 57 orang PNS,
Komposisi jumlah Karyawan berdasarkan perangkat dan golongan	
Kepala Dinas	: Pembina Utama Muda/IVc
Kepala Bidang	: Pembina/IVa : 4 orang
Sekretaris	:
Kepala Seksi	:
	1. Penata TK.I/ III d : 9 orang
	2. Pembina/IVa : 2 orang
	3. Penata/IIIc : 1 orang
Kepala Subbagian	: Penata TK.I/III d : 3 orang
Staf	:
	1. Penata TK I/III d : 3 orang
	2. Penata Muda TK.I/III b : 10 orang
	3. Penata/IIIc : 11 orang
	4. Penata Muda/IIIa : 3 orang
	5. Pengatur Muda TK.I/II d: 3 orang
	6. Pengatur/IIc : 4 orang
	7. Pengatur Muda TK.I/II b: 3 orang
Pejabat Fungsional	:

### 2.2.2 Perlengkapan

Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai menempati lahan seluas 2226 m<sup>2</sup> dengan luas bangunan 274 m<sup>2</sup> dengan satu Masjid dengan luas 800 m<sup>2</sup>

gudang dengan luas 800 m2 Aula dengan luas 135M2 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan**

<b>No</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Satuan</b>	<b>Keterangan</b>
1	Tanah	2226	Meter 2	
2	Gedung	274	Meter 2	Baik
3	Mesjid	42	Meter 2	Baik
4	Aula	135	Meter 2	Baik
5	Gudang Buku	800	Meter 2	Baik
6	AC	1	Buah	Baik
7	AC 1 PK	1	Buah	Baik
8	AC ½ PK	1	Buah	Baik
9	AC duduk	1	Buah	Baik
10	AC Floor (Portable) 2 PK	4	Buah	Baik
11	AC Split	14	Buah	Baik
12	Akses Point	3	Buah	Baik
13	Kamera Digital	9	Buah	Baik
14	Elekton	1	Buah	Baik
15	Faximili	2	Buah	Baik
16	Felling Kabinet	1	Buah	Baik
17	Handy Came	3	Buah	Baik
18	Headset	2	Buah	Baik
19	Hub Dlink 24 Port	2	Buah	Baik
20	Infocus	2	Buah	Baik
21	Jeep	1	Buah	Baik
22	Karpet Mushollah	1	Buah	Baik
23	Komputer PC Desktop	2	Buah	Baik
24	Kursi	4	Buah	Baik
25	Kursi Besi	65	Buah	Baik
26	Kursi Kerja	28	Buah	Baik
27	Kursi Lipat	19	Buah	Baik
28	Kursi Pengawas	8	Buah	Baik
29	Kursi Pimpinan	56	Buah	Baik
30	Kursi rapat	11	Buah	Baik

31	Laptop	25	Buah	Baik
32	Layar Proyektor	1	Buah	Baik
33	LCD Infocus	2	Buah	Baik
34	Lemari Arsip	19	Buah	Baik
35	Lemari Es	2	Buah	Baik
36	Lemari Pakaian Adat	1	Buah	Baik
37	Loud Speaker	2	Buah	Baik
38	Megaphone	1	Buah	Baik
39	Meja Biro	113	Buah	Baik
40	Meja Rapat	9	Buah	Baik
41	Meja Rias	1	Buah	Baik
42	Mesin Absensi Elektrik	1	Buah	Baik
43	Mesin Ketik	1	Buah	Baik
44	Mic Aktif	4	Buah	Baik
45	Mimbar/Podium	1	Buah	Baik
46	Mixer	1	Buah	Baik
47	Notebook	11	Unit	Baik
48	PC Unit	31	Unit	Baik
49	PC Destop	3	Unit	Baik
50	Pick Up	1	Unit	Baik
51	Printer	25	Unit	Baik
52	Proyektor	2	Unit	Baik
53	Rak Buku Dorong	1	Buah	Baik
54	Scanner	1	Unit	Baik
55	Sepeda Motor	76	Unit	Baik
56	Sound Sistem	4	Unit	Baik
57	Speed Boot	1	Unit	Baik
58	Televisi	1	Unit	Baik
59	Unit Power Suplay	6	Buah	Baik
60	Webcam	2	Unit	Baik

## 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan

Kondisi pendidikan di Kabupaten Sinjai lima tahun terakhir sebagai berikut:

Kinerja Pelayanan Pendidikan dikelompokkan dalam:

### 2.3.1 Perkembangan Jumlah Anak Usia Dini Lima Tahun Terakhir

Tabel 2.3.1  
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kab. Sinjai  
Tahun 2013 - 2017

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah siswa pd jenjang TK / RA / Penitipan Anak	12.638	12.621	11.574	10.978	12.290
2	Jumlah anak usia 4-6 tahun	9.129	20.466	12.815	11.933	12.755
3	Persentase (%)	63,19	61,67	91,51	92,79	96,52

Selama periode 2013-2018, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan berhasil meningkatkan partisipasi PAUD (Usia 3-6 tahun) menjadi 96,52% pada tahun 2017 atau naik 33,00% dari capaian pada tahun 2013 yaitu 63,19%. Capaian tersebut didukung oleh Program Pendidikan Anak Usia yang mendorong tumbuh kembang anak secara optimal dan menyiapkan mereka untuk memasuki jenjang pendidikan SD/MI secara lebih baik. Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah dan masyarakat untuk memperluas dan meningkatkan mutu penyelenggaraan PAUD serta meningkatkan perluasan pendidikan anak usia dini dalam rangka membina, menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal agar memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya.



### 2.3.2 Angka Partisipasi Kasar

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Tahun 2013-2017  
Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Sinjai

NO	Uraian	Angka Partisipasi Kasar (APK) (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI/Sederajat :	105,98	101,25	105,63	105,83	113,98
2	SMP/MTS/Sederajat:	116,51	109,12	109,04	103,86	115,35
3	SMA/MA/Sederajat:	82,22	83,93	83,31	79,22	-

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Sinjai

Fokus pada pengembangan Akses Pendidikan Dasar pada Tahun 2013-2018 adalah penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun salah satu terobosan yang dilakukan adalah pada tingkat Nasional meningkatnya harga satuan Biaya Operasional Sekolah (BOS) untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs, meningkatnya Kuota Sasaran BSM dan pada Tingkat Provinsi dan Daerah adalah Program Pembebasan Biaya Pendidikan untuk menjamin pendidikan dasar dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa membebani orang tua dengan pungutan-pungutan yang mampu mendorong naiknya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan SD/MI, SMP/MTs dan SM/K/MA menjadi 113,98 untuk SD sederajat, 115,35 untuk SMP sederajat.

Pembangunan Pendidikan Menengah difokuskan pada dua hal yaitu meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas dan meningkatkan relevansi lulusan pendidikan menengah terhadap dunia kerja. Partisipasi penduduk yang mengikuti pendidikan menengah meningkat selama periode 2013-2016 capaian APK SMA/SMK/MA sebesar 85,53% dan untuk tahun 2017-2018 sudah beralih ke tingkat Provinsi.

### 2.3.3 Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Tabel 2.3.3  
Persentase angka pendidikan yang ditamatkan Tahun 2013-2017  
Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI/Sederajat :					
1.1.	∑ penduduk yg tamat pada usia 12 thn	5.123	5.166	5.280	5.211	4.853
1.2	∑ penduduk usia 12 th	5.376	4.509	5.463	4.935	4.719
1.3	Persentase	95,29	114,57	96,65	105,59	102,83
2	SMP/MTS/Sederajat:					
2.1	∑ penduduk yg tamat pada usia 15 thn	4.069	4.167	4.360	4.333	4.627
2.2	∑ penduduk usia 15 th	4.377	4.401	4.445	4.844	5.362
2.3	Persentase	92,96	94,68	98,09	89,45	86,29
3	SMA/MA/Sederajat:					
3.1	∑ penduduk yg tamat pada usia 18 thn	3.211	3.218	3.298	3.255	0
3.2	∑ penduduk usia 18 th	3.595	3.612	3.647	3.971	4.831
3.3	Persentase	89,32	89,09	90,43	81,97	0

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Sinjai

### 2.3.4 Angka Partisipasi Murni

Tabel 2.76  
Perkembangan Angka Partisipasi Murni Tahun 2013-2017  
Kabupaten Sinjai

NO	JENJANG PENDIDIKAN	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.4.1	SD/MI/paket A					
1.4.1.1	JUMLAH MURID USIA 7-12 THN	31.692	28.617	30.396	29.498	27.350
1.4.1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn	32.381	32.381	34.545	29.498	27.350
1.4.1.3	APM SD/MI/Paket A	98,47	88,38	87,99	99,50	100
1.4.2	SMP/MTS/paket B					
1.4.2.1	Jumlah murid usia 13-15 thn	12.043	11.274	13.960	13.508	13.176
1.4.2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn	14.050	14.132	17.485	13.784	13.176
1.4.2.3	APM SMP/MTS/Paket B	85,72	79,78	79,84	78,27	100
1.4.3	SMA / SMK/MA/PAket C					
1.4.3.1	JUMLAH MURID USIA 16-18 THN	11.148	9.198	11.525	12.405	0
1.4.3.2	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 thn	14.901	14.975	19.883	16.296	0
1.4.3.3	APM SMA / SMK / MA / PAket C	74,81	61,42	57,96	68,37	0

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah presentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan

Perkembangan Angka Partisipasi Murni dari tahun ke tahun cenderung meningkat meskipun trend usia penduduk cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2013 APM tingkat SD sederajat mencapai 98,47% dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 100%. Sedangkan jumlah penduduk pada tahun 2017 usia 7-12 tahun sebanyak 32.381 orang dan

ditahun 2017 cenderung menurun menjadi 27.350 orang. Untuk tingkat SMP sederajat Pada tahun 2013 APM mencapai 85,72% dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 100%. Sedangkan jumlah penduduk pada tahun 2017 usia 13-15 tahun sebanyak 14.050 orang dan ditahun 2017 cenderung menurun menjadi 13.176 orang. Sedangkan pada tingkat SMA sederajat Pada tahun 2013 APM 74,81% dan pada tahun 2017 telah berpindah menjadi kewenangan Provinsi namun pada tahun 2016 APM SMA sederajat menurun menjadi 68,37%. Perkembangan APM pada semua tingkat pendidikan tidak terlepas dari Program Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Program Pendidikan Menengah dan Kejuruan yang mewajibkan penduduk usia 7-12, 13-15, dan 16-18 Tahun memperoleh pendidikan.

### 2.3.5 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Tabel 2.77  
APS Pendidikan Dasar Tahun 2013-2017  
Kabupaten Sinjai

NO	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
<b>1.5.1</b>	<b>SD/MI</b>					
1.5.1.1	∑ Siswa Usia 7-12 thn	31.692	31.646	31.094	28.668	27.350
1.5.1.2	∑ Penduduk 7-12 Thn	32.183	32.381	32.467	32.517	31.155
<b>1.5.1.3</b>	<b>APS SD/MI</b>	<b>984.74</b>	<b>977.30</b>	<b>957.71</b>	<b>820.12</b>	<b>1.139,90</b>
<b>1.5.2</b>	<b>SMP/MTs</b>					
1.5.2.1	∑ Siswa Usia 13-15 thn	12.043	11.743	10.921	10.218	13.176
1.5.2.2	∑ Penduduk 13-15 Thn	14.050	14.132	14.753	17.116	17.673
<b>1.5.2.3</b>	<b>APS SMP/MTs</b>	<b>857.15</b>	<b>830.95</b>	<b>740.26</b>	<b>5,954.55</b>	<b>1.341,30</b>
<b>1.5.3</b>	<b>SMA/MA/SMK</b>					
1.5.3.1	∑ Siswa Usia 16-18 thn	11.400	10.059	9.301	9.519	0
1.5.3.2	∑ Penduduk 16-18 Thn	14.901	14.975	12.719	13.753	0
<b>1.5.3.3</b>	<b>APS SMP/MTs</b>	<b>765.05</b>	<b>671.72</b>	<b>731.27</b>	<b>692.14</b>	<b>0</b>

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai

Proporsi dari semua anak yang sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Perkembangan APS di kabupaten Sinjai cenderung meningkat dari tahun ke tahun disebabkan oleh adanya respon positif dari masyarakat dalam menanggapi program-program pemerintah khususnya pada bidang pendidikan sehingga animo masyarakat untuk bersekolah semakin meningkat dan kondisi ekonomi masyarakat yang semakin maju mendorong tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan untuk masa depan bangsa.

### 2.3.6 Angka Putus Sekolah

Tabel. 2.78  
Angka putus Sekolah Tahun 2013-2017  
Kabupaten Sinjai

NO	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.6.1	<b>SD/MI</b>					
1.6.1.1	∑ capaian kinerja APS SD/MI se kab.	34.106	34.077	32.787	32.258	31.176
1.6.1.2	∑ seluruh APS SD/MI se Kab.	316	7	5	6	4
1.6.1.3	<b>APS SD/MI</b>	<b>1,06</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
1.6.2	<b>SMP/MTs</b>					
1.6.2.1	∑ capaian kinerja APS SMP/MTs se kab.	16.370	15.835	15.108	15.447	15.119
1.6.2.2	∑ seluruh APS SMP/MTs se Kab.	109	85	31	31	11
1.6.2.3	<b>APS SMP/MTs</b>	<b>0,67</b>	<b>0,54</b>	<b>0,21</b>	<b>0,20</b>	<b>0,07</b>
1.6.3	<b>SMA/MA/SMK</b>					
1.6.3.1	∑ capaian kinerja APS SMA/SMK/MA se kab.	12.251	11.538	12.027	12.400	0
1.6.3.2	∑ seluruh APS SMA/SMK/MA se Kab.	60	62	63	60	0
1.6.3.3	<b>APS SMA/SMK/MA</b>	<b>0,49</b>	<b>0,54</b>	<b>0,52</b>	<b>0,48</b>	<b>0</b>

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai

Angka Putus Sekolah adalah proporsi anak menurut kelompok usia sekolah anak yang sudah tidak bersekolah atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Selama periode 2013-2018 angka putus sekolah cenderung mengalami penurunan pada tahun 2013 jumlah anak putus sekolah tingkat SD sederajat 1,06% menurun menjadi 0,02% untuk tingkat SMP sederajat pada tahun 2013 sebanyak 0,67% menurun menjadi 0,07% pada tahun 2017 sedangkan tingkat SMA sederajat pada tahun 2013 mencapai 0,49 persen menurun menjadi 0,48% pada tahun 2016 dan di tahun 2017 sudah beralih ke provinsi. Penurunan angka putus sekolah disebabkan karena adanya program-program pemerintah yang memberikan banyak peluang kepada masyarakat utamanya masyarakat tidak mampu untuk tetap bersekolah, program-program tersebut diantaranya perogram pendidikan dasar, program pembebasan biaya pendidikan dan Biaya Operasional Sekolah.

### 2.3.7. Angka Kelulusan

Tabel. 2.79  
Angka Kelulusan Tahun 2013-2017  
Kabupaten Sinjai

NO	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
<b>1.7.1</b>	<b>SD/MI/Paket A</b>					
1.7.1.1	∑ lulusan pd jenjang SD/MI	5.123	5.166	5.280	5.211	4.853
1.7.1.2	∑ siswa tingkat tertinggi pd jenjang SD/MI pd thn sebelumnya	5.157	5.199	5.293	5.221	4.929
<b>1.7.1.3</b>	<b>AK SD/MI/PAket A</b>	<b>99,34</b>	<b>99,37</b>	<b>99,75</b>	<b>99,81</b>	<b>98,36</b>
<b>1.7.2</b>	<b>SMP/MTs/Paket B</b>					
1.7.2.1	∑ lulusan pd jenjang SMP/MTs/paket B	4.069	4.167	4.360	4.333	4.627
1.7.2.2	∑ Siswa tingkat tertinggi pd jenjang SMP/Mts/ Paket C pd thn sebelumnya	4.438	4.261	4.405	4.361	4.704
<b>1.7.2.3</b>	<b>AK SMP/MTs/PAket B</b>	<b>91,68</b>	<b>97,79</b>	<b>99,16</b>	<b>99,36</b>	<b>98,36</b>
<b>1.7.3</b>	<b>SMA/MA/SMK/Paket C</b>					
1.7.3.1	∑ lulusan pd jenjang SMA/SMK/MA/Paket C	3.211	3.218	3.298	3.255	0

1.7.3.2	∑ siswa tingkat tertinggi pd jenjang SMS/ SMK/ MA/Paket C pd thn sebelumnya	3.309	3.252	3.326	3.264	0
1.7.3.3.	<b>AK SMA/SMK/MA/ Paket C</b>	<b>97,04</b>	<b>98,95</b>	<b>99,16</b>	<b>99,72</b>	<b>0</b>

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai

Angka Kelulusan adalah perbandingan antara jumlah siswa yang menamatkan pendidikan dengan jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang pendidikan tertentu. Angka kelulusan dari tahun ketahun cenderung berfluktuasi pada tahun 2013 jumlah lulusan tingkat SD sederajat 99,34% dan pada tahun 2017 menjadi 98,36%, untuk tingkat SMP sederajat 91,68% dan ditahun 2017 mencapai 98,36% sedangkan untuk tingkat SMA sederajat ditahun 2013 mencapai 97,04% dan tahun 2016 mencapai 99,72% hal ini disebabkan karena kurangnya kesiapan siswa dalam menghadapi materi yang diujikan serta kurangnya kualitas profesi guru sebagai pengajar.

### 2.3.8. Angka Melanjutkan (AM)

Tabel.2.80  
Angka melanjutkan Tahun 2013-2017  
Kabupaten Sinjai

NO	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	JUMLAH LULUSAN SD/MI	5123	5166	5280	5211	5211
	JUMLAH SISWA BARU SMP/MTs	4697	5193	5317	5211	5032
	<b>PRESENTASE</b>	<b>91,68</b>	<b>100,52</b>	<b>100,70</b>	<b>100</b>	<b>96,56</b>
2	JUMLAH LULUSAN SMP/MTs	3993	4167	4360	4563	4333
	JUMLAH SISWA BARU SMA/SMK/MA	3813	4295	4507	4333	0
	<b>PRESENTASE</b>	<b>95,49</b>	<b>103,07</b>	<b>103,37</b>	<b>105,31</b>	<b>0</b>
3	JUMLAH LULUSAN SMA/SMK/MA	3211	3218	3326	3255	0
	JUMLAH SISWA BARU PT	DATA TIDAK DI KETAHUI				
	<b>PRESENTASE</b>	DATA TIDAK DI KETAHUI				

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai

Angka Melanjutkan adalah perbandingan anantara jumlah lulusan tingkat sebelumnya dengan jumlah siswa baru pada tingkat yang lebih tinggi untuk siswa SD sederajat pada tahun 2013 angka melanjutkan sebesar 91,68% dan pada tahun 2017 menjadi 95,49% sedangkan pada tingkat SMP ditahun 2013 mencapai 93,71% dan ditahun 2017 menjadi 105,31% peningkatan ini disebabkan karena tingginya animo masyarakat akan pentingnya pendidikan dan ditunjang oleh program pemerintah dibidang pendidikan utamanya program pembebasan biaya pendidikan dan dana BOS sehingga siswa bersemangat untuk melanjutkan pendidikan hingga ada beberapa siswa yang berasal dari daerah tetangga yang bersekolah di Kabupaten Sinjai.

B. Peningkatan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal

### 2.3.9. Fasilitas Pendidikan

Tabel. 2.81  
Fasilitas Pendidikan Dalam Kondisi Bangunan Baik Tahun 2013-2017  
Kabupaten Sinjai

NO	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.9.1.	Sekolah Pendidikan SD/MI					
1,9.1.1	∑ Kondisi Bangunan Baik	219	229	219	216	203
1.9.1.2	∑ Seluruh Sekolah SD/MI	241	241	242	242	243
1.9.1.3	Peresentase	90,87	95,02	90,49	89,26	83,54
1.9.2.	Sekolah Pendidikan SMP/MTs & SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik					
1.9.2.1	∑ Sekolah Pendidikan dalam Kondisi Bangunan Baik	47	62	51	42	35
1.9.2.2	∑ Seluruh Sekolah SMP/MTs & SMA/SMK/MA	68	68	68	42	42
1.9.2.3	<b>PRESENTASE</b>	69,18	91,18	75,00	100	83,33

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai

Salah satu bentuk dukungan kemajuan pendidikan di Kabupaten Sinjai adalah pemenuhan fasilitas pendidikan terutama bangunan sekolah yang layak untuk tahun 2013 presentase gedung sekolah dalam kondisi baik untuk tingkat SD sederajat sebesar 90,87, untuk SMP sederajat sebesar 69,18 dan



pada tahun 2017 tingkat SD sederajat mengalami penurunan menjadi 83,54% dan SMP sederajat meningkat menjadi 83,33% keadaan ini disebabkan karena keterbatasan dana pemeliharaan fasilitas pendidikan utamanya sekolah yang berada didaerah terpencil, kondisi geografis yang tidak mendukung serta kurangnya data rill mengenai keadaan bangunan sekolah.

### 2.3.10. Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar

Tabel 2.82

Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Tahun 2011-2016 Kabupaten Sinjai

NO	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI					
1.1	∑ Sekolah SD/MI	271	272	273	274	274
1.2	∑ Penduduk Usia 7-12 Tahun	33.488	33.454	32.467	31.163	31.155
1.3	RASIO	1:124	1:123	1:119	1:114	1:114
2	SMP/MTS					
2.1	∑ Sekolah SMP/MTs	84	85	86	87	87
2.2	∑ Penduduk Usia 13-15 Tahun	13.763	14.753	16.389	17.116	17.673
2.3	RASIO	1:164	1:174	1:191	1:197	1:203

Sumber: Dinas Pendidikan, Kab. Sinjai

Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah tingkat pendidikan dasar adalah perbandingan antara ketersediaan sekolah dengan penduduk usia sekolah dari tabel diatas untuk tingkat Pendidikan Dasar ketersediaan sekolah sudah memenuhi kebutuhan dimana tiap satuan pendidikan jumlah siswa untuk setiap ruangan rata-rata sudah tidak lebih dari 32 siswa persekolah hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan sekolah SD sederajat dan SMP sederajat sudah menyeluruh di semua desa dan kelurahan dikabupaten Sinjai sehingga penduduk sudah tidak merasakan kesulitan untuk menempuh pendidikan dasar dikabupaten Sinjai.

### 2.3.11. Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah

Tabel 2.83

Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Menengah Tahun 2012 –2016 Kabupaten Sinjai

NO	JENJANG PENDIDIKAN	2013	2014	2015	2016	2017
1	SMA/MA/SMK					
1.1	∑ Sekolah	47	51	52	52	0
1.2	∑ Penduduk Usia 16-18 Tahun	12.649	12.770	12.719	14.975	0
1.3	Rasio	1:269	1:250	1:244	1:289	0

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai

Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah tingkat pendidikan menengah dari tabel diatas untuk tingkat Pendidikan Menengah ketersediaan sekolah belum memenuhi kebutuhan dimana tiap satuan pendidikan jumlah siswa untuk setiap ruangan rata-rata sudah lebih dari 32 siswa persekolah hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan sekolah Menengah sederajat belum menyeluruh di semua desa dan kelurahan dikabupaten Sinjai sehingga penduduk masih merasakan kesulitan untuk menempuh pendidikan menengah dikabupaten Sinjai

### 2.3.12. Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar

Tabel. 2.84

Rasio Guru/Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2013 – 2017 Kabupaten Sinjai

NO	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Guru	1.966	2.106	2.366	2.954	1804
1.2	Jumlah Murid	34.077	32.787	31.094	28.825	31.176
1.3	RASIO	1:17	1:16	1:13	1:9	1:17
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Guru	645	881	961	998	679
2.2	Jumlah Murid	15.835	15.421	14.617	14.317	15.199
2.3	RASIO	1:24	1:18	1:15	1:14	1:24

Sumber: Dinas Pendidikan, Kab. Sinjai

Rasio Guru per siswa adalah perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah siswa perkembangan data yang berfluktuasi disebabkan ketidakadaan data yang memadai sehingga terjadi perkembangan rasio guru per murid yang tidak konsekuen dari tahun ketahun hal ini terlihat jelas pada tiap tabel yang berbeda dan tidak konsisten baik perkembangan maupun penurunannya hal ini dipengaruhi oleh faktor pendataan yang mana adakalanya jumlah guru yang relatif tinggi karena masuknya data guru honorer serta adanya data guru yang ganda karena mengajar pada beberapa sekolah.

### 2.3.13 Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah

Tabel. 2.85  
Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah  
Tahun 2013 – 2017 Kabupaten Sinjai

NO	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	SMA/MA/SMK					
1.1	Jumlah Guru	1.424	1.490	646	697	0
1.2	Jumlah Murid	12.251	12.569	12.602	12.846	0
1.3	RASIO	1:9	1:8	1:20	1:18	0

Sumber: Dinas Pendidikan, Kab. Sinjai

Untuk tingkat Sekolah Menengah dan kejuruan rasio guru per murid cenderung konstan.

### 2.4.14 Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata Sekolah Dasar

Tabel. 2.86  
Rasio guru/murid perkelas rata-rata sekolah dasar  
Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	$\Sigma$ Guru Sekolah Pendidikan Dasar Per Kelas	0	0	0	0	0
2.	$\Sigma$ Murid Pendidikan Dasar	49.912	48.208	45.711	39.188	46.375
3.	Rasio	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai

### 2.3.15 Rasio Guru terhadap Murid Per Kelas Rata-rata

Tabel. 2.87

Rasio guru terhadap murid perkelas rata-rata  
Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	$\Sigma$ GURU SEKOLAH MENENGAH PER KELAS	0	0	0	0	0
2.	$\Sigma$ MURID PENDIDIKAN MENENGAH	12.251	12.569	12.602	12.846	0
3.	RASIO	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai

**2.3.16 Proporsi murid Kelas 1 yang Berhasil Menamatkan Sekolah Dasar**

Tabel. 2.88

Proporsi murid kelas I yg berhasil menamatkan sekolah dasar  
Tahun 2013-2017 Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Banyaknya lulusan SD	5.123	5.166	5.280	5.211	4.853
2.	Banyaknya penduduk usia 12 Tahun	5.490	5.419	5.334	5.208	5.107
3.	Presentase	93,32	95,33	98,99	100,05	95,03

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai

**2.3.17 Penduduk yang Berusia 15 – 59 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta Aksara)**

Tabel 2.90

Penduduk yg berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)  
Kabupaten Sinjai

NO	URAIAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Banyaknya penduduk usia 15-59 th	159.438	156.983	158.515	141.608	182.327
2	$\Sigma$ Penduduk Usia 15-59 Tahun yg melek huruf	156.670	155.489	148.162	141.608	182.327
<b>3</b>	<b>PERSENTASE</b>	<b>98,26</b>	<b>99,04</b>	<b>93,46</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai

Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka melek huruf didapat dengan membagi jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas kemudian hasilnya dikalikan dengan seratus

Pemerintah Kabupaten Sinjai melalui Dinas Pendidikan telah melakukan program penuntasan terhadap data base Penduduk Buta Aksara (By Name By Address) hasil pendataan tenaga lapangan Dikmas Kabupaten Sinjai Tahun 2009 sebanyak 11.787 Orang. Dari data tersebut semuanya telah dituntaskan melalui Program Penuntasan Buta Aksara sejak tahun 2009 sampai tahun 2015 melalui Dana APBD II Kabupaten Sinjai, APBD I Provinsi Sulawesi Selatan dan APBN hingga tuntas Melek Aksaran sebanyak 11.787 orang. Walau demikian data Buta Aksara Versi BPS sebagai data makro hasil sensus masih tersisa sebanyak 5.272 orang dan akan diadakan penelusuran / pendataan by name by address. Karena telah mencapai target yang ditetapkan maka untuk tahun 2017 sudah tidak ada lagi kegiatan untuk peningkatan Angka Melek Huruf dan yang dilaksanakan adalah kegiatan lanjutan untuk menghindari atau mencegah penduduk yang melek huruf kembali menjadi buta huruf.

#### **2.4.19 Guru yang Memenuhi Kualitas SI / D-IV**

Tabel 2.91  
Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV Di Kabupaten Sinjai  
Tahun 2012-2017

<b>NO</b>	<b>JENJANG PENDIDIKAN</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Guru Kualifikasi S1/D4	2.179	2.500	1.738	1.784	1.795
1.2	Jumlah Guru	3.485	3.300	1.796	1.808	1.804
1.3	RASIO	62,53	75,76	96,77	98,67	99,50
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Guru Kualifikasi S1/D4	1.527	1,550	706	759	679
2.2	Jumlah Guru	1.659	1,637	706	759	679
2.3	RASIO	92,04	94,69	100	100	100

NO	JENJANG PENDIDIKAN	2013	2014	2015	2016	2017
3	SMA/SMK/MA					
3.1	Jumlah Guru Kualifikasi S1/D4	1.378	1.460	646	697	0
3.2	Jumlah Guru	1.424	1.490	646	697	0
3.3	RASIO	96,77	97,99	100	100	0

*Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai*

Menurut Undang Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 7, profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut : (1) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme, (2) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia, (3) memiliki kualitas akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas, (4) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, (5) memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan, (6) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja, (7) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat, (8) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan dan (9) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Dalam kenyataannya mutu guru di Indonesia sangat beragam dan rata-rata masih di bawah standar yang telah ditentukan. Banyak guru yang belum memenuhi standar kualifikasi pendidikan dan belum mempunyai kompetensi yang telah disyaratkan.

Dalam Undang Undang No. 14/2005 pasal 2, disebutkan bahwa pengakuan guru sebagai tenaga yang profesional dibuktikan dengan sertifikasi pendidik. Selanjutnya pasal 11 menjelaskan bahwa sertifikasi pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.

Tujuan sertifikasi adalah untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional; meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan; meningkatkan martabat guru; dan meningkatkan profesionalisme guru. Untuk tujuan yang terakhir ini guru dituntut agar dapat melaksanakan tugasnya secara profesional. Artinya, dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik guru harus dapat memenuhi keinginan/harapan

masyarakat dalam hal ini siswa dan orang tua; memiliki landasan pengetahuan yang kuat dan terkini khususnya dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya; dan dalam proses untuk mendapatkan profesionalisme itu hendaknya dilakukan atas dasar kompetensi individu, bukan hasil KKN.

Berdasarkan data pada tabel presentase guru yang memiliki kualifikasi pendidikan semakin meningkat hal ini karena adanya beberapa program pemerintah diantaranya pemberian bantuan kepada Mahasiswa Berprestasi, dan adanya sertifikasi pendidik yang sudah memenuhi kualifikasi pendidikan berdasarkan mata pelajaran yang ampuh sehingga mengharuskan pendidik untuk terus mengembangkan diri walau demikian standar mutu pendidikan masih tergolong rendah dengan belum tercapainya rerata ujian nasional yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

#### 2.4 Tantangan dan Peluang Perkembangan Pelayanan Perangkat Daerah Dalam pengembangan pendidikan di Kabupaten Sinjai Dinas Pendidikan Menghadapi hambatan sebagai berikut:

##### 1. Akses

- a. Belum Tersedianya data base yang rill usia sekolah
- b. Masih kurangnya sosialisasi dan rendahnya pemahaman pengelolaan sarana dan prasarana PAUD dan PNF didesa
- c. Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas belum maksimal
- d. Tingginya anak mutasi keluar kota karena alasan ikut orang tua yang bekerja keluar daerah
- e. Masih terbatasnya penyediaan berbagai pendidikan alternatif yang dibutuhkan masyarakat (Formal dan Non Formal)
- f. Belum maksimalnya pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan
- g. Belum terlaksananya sistem zonasi

##### 2. Mutu

- a. Peningkatan kualitas pembelajaran belum maksimal
- b. Rendahnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan
- c. Lemahnya pelaksanaan kurikulum
- d. Lemahnya sistem penilaian pendidikan
- e. Kualitas, kompetensi dan profesionalisme guru masih harus ditingkatkan
- f. Masih terbatasnya pengembangan sekolah dan kelas unggulan/Sekolah unggulan
- g. Kekurangan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan khususnya pada daerah pedesaan dan terpencil
- h. Persebaran pendidik yang belum proporsional

- i. Masih rendahnya kompetensi lulusan
  - j. Tuntutan keaksaraan mutu lembaga pendidikan Non Formal
  - k. Belum maksimalnya pelaksanaan supervisi pendidikan (pengawasan sekolah)
3. Tata Kelola
- a. Tidak konsisten dan benturan antar regulasi pendidikan
  - b. Lemahnya manajemen sekolah
  - c. Belum terlaksananya pendidikan berbasis masyarakat dan berorientasi pada keterampilan hidup
  - d. Belum maksimalnya pemberdayaan personil dan lembaga pendidikan
  - e. Pelaksanaan Monitorig dan evaluasi pendidikan belum berjalan dengan baik
  - f. Masih terbatasnya pengembangan sekolah unggulan dan sekolah model



## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Pendidikan berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berikut adalah identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai:

1. Akses
  - a. Belum Tersedianya data base Pendidikan.
  - b. Masih rendahnya pemahaman pengelolaan sarana dan prasarana PAUD dan PNF didesa dan Pendidikan Dasar.
  - c. Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan PAUD dan PNF dan Pendidikan Dasar yang berkualitas belum maksimal
  - d. Pengembangan Media Informasi Pendidikan yang terintegrasi dan terpadu.
2. Mutu
  - a. Masih rendahnya kompetensi lulusan
  - b. **Pemahaman terhadap standar isi masih lemah**
  - c. Kualitas pembelajaran belum maksimal
  - d. Pemahaman Guru terhadap implementasi penilaian
  - e. Sarana dan prasarana Pendidikan belum memenuhi standar
  - f. Persebaran pendidik yang belum proporsional
  - g. Belum maksimalnya evaluasi kinerja guru dan Kepala Sekolah
  - h. Belum adanya sekolah binaan pada tiap kecamatan
  - i. Kuantitas dan kualitas pengawasan sekolah belum maksimal.
3. Tata Kelola
  - a. Kurangnya tindak lanjut regulasi Pendidikan dari Kementrian
  - b. Lemahnya manajemen sekolah
  - c. Belum terlaksananya pendidikan berbasis masyarakat dan berorientasi pada keterampilan hidup
  - d. Belum maksimalnya pemberdayaan personil dan lembaga pendidikan
  - e. Pelaksanaan Monitorig dan evaluasi pendidikan belum berjalan dengan baik
  - f. Masih terbatasnya pengembangan sekolah unggulan dan sekolah model

**Tabel 3.1**

#### Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD

Aspek Kajian	Capaian Kondisi saat ini	Stand ar yang digun akan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal	Eksternal	
Rata-rata lama sekolah	8,8	IPM	1. Ketersediaan Fasilitas Pendidikan 2. Kebijakan Pendanaan	1. Paradigma Pendidikan 2. Kemiskinan 3. Kondisi Sosial	Keterbatasan Sumber Daya dan Anggaran

			Pendidikan	Kemasyarakan	
Harapan Lama Sekolah	8,8	IPM	1. Ketersediaan Fasilitas Pendidikan 2. Kebijakan Pendanaan Pendidikan	1. Paradigma Pendidikan 2. Kemiskinan 3. Kondisi Sosial Kemasyarakan	Keterbatasan Sumber Daya dan Anggaran
Nilai Rata-Rata UASDA SD/MI	62,74	Rata-rata UN Nasional	Kualitas PTK	Kondisi Sosial Kemasyarakan	Kualifikasi dan Sertifikasi Guru belum 100% Sistem zonasi belum dilaksanakan
Nilai Rata-rata UN SMP/MTs	Blank	Rata-rata UN Nasional	Kualifikasi PTK	Kondisi Sosial Kemasyarakan	Sertifikasi dan zonasi belum 100%
APK PAUD	97,56	SPM	1. Ketersediaan Fasilitas Pendidikan 2. Kebijakan Pendanaan Pendidikan	Demografi, Sosial, Kemasyarakan, Kemiskinan	Keterbatasan SDm dan Anggaran
APK SD	115,84	SPM	3. Ketersediaan Fasilitas Pendidikan 4. Kebijakan Pendanaan Pendidikan	Demografi, Sosial, Kemasyarakan, Kemiskinan	Keterbatasan SDm dan Anggaran
APK SMP	114,54	SPM	5. Ketersediaan Fasilitas Pendidikan 6. Kebijakan Pendanaan Pendidikan	Demografi, Sosial, Kemasyarakan, Kemiskinan	Keterbatasan SDm dan Anggaran
APM SD	100	SPM	7. Ketersediaan Fasilitas Pendidikan 8. Kebijakan	Demografi, Sosial, Kemasyarakan,	Keterbatasan SDm dan Anggaran

			Pendanaan Pendidikan	Kemiskinan	
APM SMP	100	SPM	9. Ketersediaan Fasilitas Pendidikan 10. Kebijakan Pendanaan Pendidikan	Demografi, Sosial, Kemasyarakatan, Kemiskinan	Keterbatasan SDm dan Anggaran
APS	101,23	SPM	11. Ketersediaan Fasilitas Pendidikan 12. Kebijakan Pendanaan Pendidikan	Demografi, Sosial, Kemasyarakatan, Kemiskinan	Keterbatasan SDm dan Anggaran

### 3.2 Telaah Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintahan daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam kerangka besar itulah visi, misi dan program kerja Bupati terpilih lima tahun kedepan merupakan tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2018-2023, diarahkan untuk membawa masyarakat Kabupaten Sinjai menuju suatu kehidupan masyarakat yang sejahtera, berakhlak, bermartabat, berkarakter dan bermakna. Maka visi pembangunan Kabupaten Sinjai 2018-2023 adalah:

**“Terwujudnya masyarakat Sinjai yang mandiri, berkeadilan, dan religius melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing”**

#### **Misi**

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif.
2. Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis.

3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat.
4. Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa.
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah.
6. Mendorong terciptanya ketenteraman dan ketertiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan ber-masyarakat yang patuh kepada hukum.
7. Memelihara kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam pada wilayah pulau dan pesisir, dataran rendah serta pegunungan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan.

Bedasarkan pada visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Sinjai tahun 2018-2023 maka disusun tujuan pembangunan selama lima tahun kedepan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penerapan e-government dalam rangka akselerasi reformasi birokrasi  
Sasaran:
  - a. Meningkatnya integrasi perencanaan dan penganggaran serta pelaporan-nya berbasis elektronik
2. Memenuhi standar minimal pelayanan dasar dan pelayanan umum yang strategis  
Sasaran:
  - a. Terpenuhinya standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar
  - b. Meningkatnya kapasitas pelayanan umum yang strategis
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat
4. Meningkatkan pendapatan daerah  
Sasaran
  - a. Meningkatnya produktivitas sumber-sumber pendapatan daerah
5. Meningkatkan kualitas manusia secara seutuhnya
  - a. Meningkatnya derajat pendidikan secara inklusif
  - b. Meningkatnya responsivitas gender dalam pembangunan
  - c. Meningkatnya Aktivitas keagamaa
6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah
7. Meningkatkan kondisi ketertiban ketentraman umum masyarakat serta kesadaran berbangsa dan bernegara
8. Mempertahankan kelestarian lingkungan hidup

- a. Meningkatnya kapasitas penanganan sampah dan kebersihan perkotaan

Berdasarkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Sinjai, Dinas Pendidikan menunjang ketercapaian misi kedua yaitu Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis dan misi keempat yaitu Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa.

### **3.3 Telaahan Renstra Kementrian / Lembaga dan Renstra Kabupaten Sinjai**

Dalam Renstra Kementrian Pendidikan Nasional tahun 2015-2019 kerangka besar visi, misi dan program kerja kementrian dalam rangka mewujudkan cita-cita kehidupan bangsa dan sejalan dengan visi pendidikan nasional ialah menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna) pada 2025. Yang dimaksud dengan insan Indonesia Cerdas adalah insan yang cerdas komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas social, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis. Usaha mencapai visi 2015 tersebut dibagi menjadi empat tema pembangunan pendidikan nasional. Tema pembangunan yang kedua (2015-2019) difokuskan pada penguatan layanan pendidikan. Sejalan dengan focus tersebut, visi Kemendiknas 2019 adalah terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk insan Indonesia cerdas komprehensif.

Yang dimaksud dengan layanan prima pendidikan nasional adalah layanan pendidik yang:

1. **Tersedia** secara merata di seluruh pelosok nusantara;
2. **Terjangkau** oleh seluruh lapisan masyarakat;
3. **Berkualitas/bermutu dan relevan** dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, dunia usaha, dan dunia industri;
4. **Setara** bagi warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan berkualitas dengan memperhatikan keberagaman latar belakang sosial-budaya, ekonomi, geografi, gender, dan sebagainya; dan
5. Menjamin **kepastian** bagi warga negara Indonesia mengenyam pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri.

Untuk mencapai visi Kemendiknas 2019, ditetapkan 5 (lima) Misi Kemendiknas 2015-2019 yang dikemas sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Kemendiknas 2015-2019**

<b>KODE</b>	<b>MISI</b>
M1	Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang kuat
M2	Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan
M3	Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu
M4	Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa
M5	Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik

Tujuan strategis Kemendiknas tahun 2015-2019 dirumuskan berdasarkan jenjang layanan pendidikan dan sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan prima pendidikan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan visi 2019 Kemendiknas dengan memperhatikan rumusan misi Kemendiknas 2015-2019. Dengan demikian, tujuan strategis Kemendiknas 2015-2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Tujuan Strategis kemendiknas 2015-2019**

<b>KODE</b>	<b>TUJUAN STRATEGIS</b>
T1	Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orang tua, dan Aparatur Institusi Pendidikan dalam Ekosistem Pendidikan
T2	Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam Melestarikan Kebudayaan
T3	Peningkatan Akses PAUD, Dikdas, Dikman, Dikmas, dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus
T4	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter
T5	Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan serta Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidik
T6	Peningkatan Sistem Tata Kelola yang transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis pembangunan pendidikan diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2019. Sasaran strategis untuk tiap tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis T1

**Tabel 3.4**

**Sasaran Strategis Kemendiknas untuk Mencapai Tujuan**

<b>Kode</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja sasaran Strategis (IKSS)</b>
SS1	Meningkatnya perilaku positif siswa	Rata-rata nilai perilaku siswa PAUD minimal baik
		Indeks Integrasi siswa SMP/SMPLB/SMK sebesar 78
		Rata-rata nilai sikap siswa SD/SMP/SM minimal baik
SS2	Meningkatnya partisipasi orang tua dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pendidikan	Orang dewasa berpartisipasi aktif dalam pendidikan keluarga sebanyak 4.343.500 orang
SS3	Meningkatnya kualitas sikap guru dan tenaga pendidikan dalam kepribadian, spiritual, dan social	Persentase guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan yang berkinerja baik sebanyak 100%

2. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan strategis T2

**Tabel 3.5**

**Sasaran Strategis Kemendiknas untuk mencapai tujuan strategis T2**

<b>Kode</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja sasaran Strategis (IKSS)</b>
SS4	Meningkatnya peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan	Pelaku budaya berperan aktif dalam melestarikan kebudayaan minimal sebanyak 1.7200.000 orang

3. Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan strategis T3

**Tabel 3.6**

**Sasaran Strategis Kemendiknas untuk mencapai tujuan Startegis T3**

<b>Kode</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja sasaran Strategis (IKSS)</b>
SS5	Meningkatnya akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat di seluruh provinsi, kabupaten, dan	APK PAUD usia 3-6 tahun sekurang-kurangnya 78,70%
		Sejumlah minimal 54,60% kabupaten dan kota memiliki lembaga PAUD terpadu

	kota	pembina holistik integratif
		Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang terakreditasi sebanyak 7.871 lembaga
		Angka melek aksara penduduk usia dewasa di atas 15 tahun sekurang-kurangnya 96,10%
		Sejumlah minimal 15,60% kabupaten dan kota memiliki minimal 1 lembaga masyarakat rujukan (PKBM, kursus dan pelatihan, atau UPTD)
SS6	Meningkatnya angka partisipasi penduduk usia pendidikan dasar dan menengah	APK SD/SDLB/Paket A sekurang-kurangnya 100,55%
		APM SD/SDLB sekurang-kurangnya 85,20%
		APK SMP/SMPLB/Paket B sekurang-kurangnya 83,77%
		APK SMP/SMPLB sekurang-kurangnya 73,72%
		APK SMA/SMK/SMLB/Paket C sekurang-kurangnya 85,71%
		APK SMA/SMK/SMLB sekurang-kurangnya 67,50%
		Rasio APK SMP/SMPLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya sebesar 0,9
		Rasio APK SMA/SMK/SMLB antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya sebesar 0,6
		Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun sebesar 8,8 tahun



4. Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan strategis T4

Tabel 3.7

Sasaran Startegis untuk mencapai Tujuan Strategis T4

<b>Kode</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)</b>
SS7	Meningkatnya mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang berwawasan gender dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan	Jumlah lembaga PAUD terakreditasi sebanyak 42.926 lembaga
		Persentase program kursus dan pelatihan yang telah menerapkan KKNI sebanyak 71,38%
SS8	Meningkatnya mutu layanan dan lulusan pendidikan dasar dan menengah	Persentase SD/SDLB berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 84,20%
		Persentase SMP/SMPLB berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 81,00%
		Persentase SMA/SMLB berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya 85%
		Persentase paket keahlian SMK berakreditasi minimal B sekurang-kurangnya 65%
		Persentase SD/SDLB yang memenuhi SPM sebanyak 61%
		Persentase SMP/SMPLB yang memenuhi SPM sebanyak 75%
		Persentase SMA/SMLB yang memenuhi SPM sebanyak 75%
		Sejumlah minimal 68% kabupaten dan kota memiliki indeks pencapaian SPM pendidikan dasar sebesar 1
		Sejumlah minimal 90% kabupaten dan kota memiliki indeks pencapaian SPM pendidikan menengah sebesar

		1
		Rata-rata nilai ujian sekolah SD/SDLB minimal 6.5
		Rata-rata nilai ujian nasional SMP/SMPLB minimal 6.5
		Rata-rata nilai ujian nasional SMA minimal 7.0 dan UN SMK minimal 7.0
		Hasil penelitian dan pengembangan minimal sebesar 80% digunakan sebagai bahan rumusan kebijakan peningkatan mutu
SS9	Meningkatnya profesionalisme dan distribusi guru dan tenaga kependidikan	Persentase guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan profesional minimal 95%
		Jumlah PTK PAUD profesional minimal sebanyak 37,00%
		Jumlah PTK Dikmas profesional minimal sebanyak 15%
		Persentase satuan pendidikan dasar memiliki jumlah guru sesuai SPM sebanyak 68,43%
		Persentase satuan pendidikan menengah memiliki jumlah guru sesuai SNP sebanyak 77,5%
SS10	Meningkatkan lembaga/satuan pendidikan dan pemangku kepentingan yang menyelenggarakan pendidikan keluarga	Jumlah lembaga/satuan pendidikan masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan orang tua/ keluarga sebanyak 87.417 lembaga

5. Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan strategis T5

Tabel 3.8

Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan strateigis T5

<b>Kode</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)</b>
SS11	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta diplomasi budaya untuk mendukung terwujudnya karakter dan jati diri bangsa yang memiliki ketahanan budaya	Indeks pembangunan kebudayaan nasional mencapai kategori sedang (skor 37)
SS12	Meningkatnya mutu bahasa dan pemakaiannya sebagai penghela Ipteks dan penguat daya saing Indonesia	Kemampuan berbahasa dalam skor PISA pada tahun 2019 menjadi 414 (dari 396 pada tahun 2012) Nilai UN bahasa Indonesia SMP/ SMPLB sebesar 7,2 dan SMA/SMALB/SMK/SMKLB sebesar 7,5
SS13	Meningkatkan peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di kawasan ASEAN	Jumlah negara ASEAN yang mengajarkan bahasa Indonesia dalam sistem pendidikan nasionalnya sebanyak 6 negara Jumlah penutur non-Indonesia di kawasan ASEAN yang menggunakan bahasa Indonesia sebanyak 2.500 orang

6. Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan strategis T6

Tabel 3.9

Sasaran Strategis untuk mencapai Tujuan Strategis T6

<b>Kode</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)</b>
SS14	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kemendikbud	Skor LAKIP minimal sebesar 80
SS15	Dipertahankannya opini laporan keuangan Kemendikbud Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Laporan keuangan Kemendikbud mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
SS16	Meningkatnya pelibatan publik dalam tata kelola pendidikan dan kebudayaan	Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud sebesar 77

Sasaran pokok pembangunan pendidikan untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10

Sasaran Pokok Pembangunan Pendidikan

<b>No</b>	<b>Sasaran Pokok</b>	<b>Sasaran 2019</b>
1	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 Tahun	8,8 thn
2	Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 Tahun	96,10%
3	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	84,20%
4	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	81,00%
5	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	84,60%
6	Persentase kompetensi keahlian SMK berakreditasi minimal B	65,00%
7	Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,90%
8	Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,60%

Misi dalam Renstra Kemendiknas tersebut sebagai dasar dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, sehingga dapat mensinergikan perencanaan pendidikan Kabupaten Sinjai dengan Pemerintah Pusat. Sedangkan arah kebijakan lima tahun kedepan Kemendiknas bertumpu pada peningkatan mutu, pendidikan karakter, penguatan TIK, pendanaan pendidikan dan penguatan pendidikan Non Formal/Informal. Oleh karena itu hal-hal tersebut nantinya akan

menjadi perhatian dalam penyusunan perencanaan Pendidikan pada Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai.

Tabel 3.11  
Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Sasaran Renstra K/L

Sasaran Resntra K/L	Permasalahan OPD terkait dengan sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Angka rata-rata lama sekolah masih 7,26 tahun dari target 12 tahun	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Mencukupi, adanya bantuan Beasiswa berprestasi, adanya bantuan siswa miskin	Kondisi sosial kemasyarakatan. Kenakalan remaja. Kemiskinan. Kondisi geografis
Rata-rata angka melek aksara penduduk usia diatas 15 tahun	Angka Melek Aksara 100% dari target 100%	Adanya Program PKBM	Data yang tidak rill Rendahnya minat belajar pada penduduk usia lanjut
Presentase SD/MI berakreditasi minimal B	Masih terdapat ... sekolah berakreditasi B dari target 243 SD berakreditasi A	Adanya kegiatan pendampingan akreditasi dan bantuan akreditasi	Sulitnya pemberian bantuan dana untuk pemenuhan sarpras di sekolah swasta Keterbatasan lahan di SD Negeri
Presentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	Masih terdapat ... sekolah berakreditasi B dari target 47 SMP	Adanya kegiatan pendampingan akreditasi dan	Sulitnya pemberian bantuan dana untuk

	berakreditasi A	bantuan akreditasi	pemenuhan sarpras di sekolah swasta Keterbatasan lahan di SMP Negeri
Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	Masih terdapat perbedaan antara data Statistik dan data yang ada pada OPD sehingga pencapaian APK dan APS yang sudah melebihi 100% masih belum sesuai dengan data statistik	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Mencukupi, adanya bantuan Beasiswa berprestasi, adanya bantuan siswa miskin	Kurangnya data keadaan penduduk yang riil Kondisi geografis Kondidi sosial kemasyarakatan Kemiskinan Kenakalan remaja

Dalam RPJMD Kabupaten Sinjai termuat visi **Terwujudnya masyarakat Sinjai yang mandiri, berkeadilan, dan religius melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing** untuk mencapai visi tersebut dijabarkan dalam misi kedua yaitu Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis dengan tujuan salah satunya adalah Memenuhi standar minimal pelayanan dasar dan pelayanan umum yang strategis dengan sasaran yang akan dicapai Terpenuhinya standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar serta berdasarkan misi keempat yaitu Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumberdaya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tujuannya salah satunya adalah Meningkatkan kualitas manusia secara seutuhnya yang sasarannya Meningkatnya derajat pendidikan secara inklusif kedua sasaran tersebut menjadi salah satu dasar perhatian dalam penyusunan perencanaan pendidikan pada Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai.

Tabel 3.12  
Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Sasaran Renstra Kabupaten  
Sinjai

<b>Sasaran Resntra Kabupaten</b>	<b>Permasalahan OPD terkait dengan sasaran Renstra Kabupaten</b>	<b>Faktor</b>	
		<b>Pendukung</b>	<b>Penghambat</b>
Terpenuhinya standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar	Belum terpenuhinya APM tingkat PAUD yaitu 100% Ketidakterediaan daya yang riil jumlah penduduk usia sekolah	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Mencukupi, adanya bantuan Beasiswa berprestasi, adanya bantuan siswa miskin	Kondisi sosial kemasyarakatan. Kenakalan remaja. Kemiskinan. Kondisi geografis
Meningkatnya derajat pendidikan secara inklusif	Belum terpenuhinya Angka rata-rata yaitu 7,28 tahun dari target 12 tahun	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Mencukupi, adanya bantuan Beasiswa berprestasi, adanya bantuan siswa miskin	Kondisi sosial kemasyarakatan. Kenakalan remaja. Kemiskinan. Kondisi geografis

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

#### 3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

#### 3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Secara umum Dinas pendidikan memiliki tugas sebagai pelaksana urusan pemerintahan, baik pusat, daerah, dibidang pendidikan. Tugas pokoknya adalah mengatur pelaksanaan urusan pendidikan sesuai wilayah kerja agar berjalan lancar dan sesuai dengan program pusat.

Isu Strategis terkait Dinas Pendidikan, diantaranya :

1. Menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro
2. Menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.
3. Menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.
4. Menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan
5. Menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.
6. Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusi dan efektif bagi semua.
7. Secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.
8. Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi ektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.



### **Capaian Indikator TPB yang Ditangani Dinas Pendidikan**

Terdapat 15 indikator TPB yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan, Berdasarkan hasil analisa, 5 indikator (dari TPB nomor 1 dan 4) telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan telah mencapai target. Sedangkan 10 indikator lainnya capaiannya tidak diketahui karena datanya tidak/belum tersedia. Hal ini menjadi catatan penting bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai untuk melengkapi kekurangan data untuk penggambaran kondisi ketercapaian TPB yang lebih baik di masa depan.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai lima tahun kedepan adalah:

1. Tujuan
  - a. Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat  
Indikatornya
    1. Meningkatnya Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah
2. Sasaran Jangka Menengah
  - a. Meningkatkan Mutu dan Aksesibilitas Pendidikan Anak Usia Dini
  - b. Meningkatkan Mutu dan Aksesibilitas Pendidikan Dasar
  - c. Meningkatkan Mutu dan Aksesibilitas Pendidikan Keaksaraan
  - d. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 secara lengkap termuat dalam tabel 4.1 di bawah

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Derajat Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Mutu dan Aksesibilitas Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD	100	100	100	100	100
			Kualifikasi Pendidikan Tenaga Pendidik PAUD	50	55	60	65	70
			Presentase PAUD yang terakreditasi	60	70	80	90	100
	Meningkatnya Mutu dan Aksesibilitas Pendidikan Dasar	APK SD/MI	114	114,5	114,9	115	115,5	
		APK SMP/MTs	115	116	117	118	119	
		APM SD/MI	100	100	100	100	100	
		APM SMP/MTs	100	100	100	100	100	
		Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan SD	75	80	85	90	95	

			Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP	75	80	85	90	95
			Presentase SD/MI yang berkreditasi B	80	85	90	95	99
			Presentase SMP/MTs yang berkreditasi B	80	85	90	95	99
			Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	95	96	97	98	100
			Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	99,75	100	100	100	100
			Persentase Guru SD yang Bersertifikasi	95	96	97	98	100
			Persentase Guru SMP yang Bersertifikasi	99,75	100	100	100	100
		Meningkatnya Mutu dan Aksesibilitas Pendidikan Keaksaraan	Angka Melek Huruf	100	100	100	100	100
			Penduduk Usia 15-59 Tahun yang Melek Huruf	100	100	100	100	100
	Indikator Tujuan Meningkatnya Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	Rerata UASDA SD/MI	66	67	68	69	70
			Rerata UN SMP/MTs	67	68	69	70	71
			Mahasiswa yang menyelesaikan kuliah S1, S2 dan S3	100 20 10	100 20 10	100 20 10	100 20 10	100 20 10



**Tabel Keterkaitan Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dengan Indikator TPB**

NO	Program OPD	Kegiatan	Indikator TPB		Capaian (existing)	Target PERPRES 59/2017	Gap Capaian	Anggaran (Rp)		
			No	Indikator				Renca na	Realisa si	%
1			1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	1	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 94,78% (2015:91,23)	0,0065			
2			1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Sederajat	1	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 82,2% (2015:79,97%)	0,201			

3			4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)				
4			4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Meningkatnya persentase SD/MI berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 84,2% (2015:68,7%)	(blank)			
5			4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Meningkatnya persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 81% (2015:62,5%)				

6			4.1.1.( d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat.	1,1 398	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat pada tahun 2019 menjadi 114,09% (2015: 108%)	0,1253			
7			4.1.1.( e)	Angka Partisipasi kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat.	0,9 935	Meningkatnya APK SMP/MTs/Sederajat pada tahun 2019 menjadi 106,94% (2015: 100,7%)	0			
8			4.1.1.( g)	rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.		Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 8,8 tahun (2015:8,25 tahun).	(blank)			

9		4.2.2.( a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	1	Meningkatnya APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2019 menjadi 77,2% (2015:70,06).	0		
---	--	---------------	---	---	---	---	--	--



10			4.5.1*	<p>Rasio Angka Partisipasi Murni(APM) Perempuan/Laki-laki (1)SD /MI/ sederajat;(2) SMP/MTs /sederajat ;(3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan/Laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.</p>	<p>4.1.Rasio Angka Partisipasi Murni(APM) Perempuan/Laki-laki di SD/MI/paket A yang setara gender pada tahun 2019.4.2 Rasio APM perempuan /laki-laki di SMP/MTs/Paket A gender pada tahun 2019.4.3 Rasio APK perempuan/laki-laki di SMKA/SMK/MA yang setara gender ada tahun 2019.4.4 Rasio APK perempuan/Laki-laki pada PT dan PTA yang setara gender pada</p>	(blank)			
----	--	--	--------	--	---	---------	--	--	--

						tahun 2019				
--	--	--	--	--	--	------------	--	--	--	--

11			4.6.1.( a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 Tahun.	Meningkatnya rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 96,1 %(2015):95,2 %.				
12			4.6.1.( b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan 15-59 tahun.	Meningkatnya persentase angka aksara penduduk usia 15-59 tahun pada tahun 2019				
13			4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke:(a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran (c) komputer untuk tujuan pengajaran,(d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas,(e) air minum layak,(f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin,(g) fasilitas cuci tangan (terdiri air,sanitasi,dan higienis	(tidak ada dalam lampiraan Perpres 59/2017)				

				bagi semua (WASH).						
14			4.c.1*	Persentase guru TK,SD,SMP,SMA,SMK,dan PLB yang Bersertifikat pendidi.		(tidak ada dalam lampiraan Perpres 59/2017)				
15			9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB		(tidak ada dalam lampiraan Perpres 59/2017)				

**Tabel Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pendidikan**

<b>No. Indikator</b>	<b>Indikator</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Isu Strategis</b>
1.4.1.(g)	Angka partisipasi Murni (APM) SD/MI Sederajat	(blank)	Menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap sumber ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.
1.4.1.(h)	Angka pPartisipasi Murni (APM) SMP/MTs sederajat.	(blank)	
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang menncapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Belum ada Data	Menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Belum ada Data	
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.		
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat .	(blank)	
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	(blank)	
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Belum ada Data	
4.2.2(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Usia Dini (PAUD).	(blank)	Menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan

			dasar.
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Perempuan /laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat;(2) SMP/MTs/ sederajat;(3) SMA/SMK/MA/ sederajat;dan Rasio Angka Kasar (APK) perempuan /laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Belum ada Data	Menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan,dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat,masyarakat penduduk asli,dan anak-anak kondisi rentan.
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara $\geq 15$ tahun.	Belum ada Data	Menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Belum ada Data	
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke :(a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran,(c) komputer untuk tujuan pengajaran,(d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas,(e) air minum layak,(f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin,(g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)	Belum ada Data	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.
4.c.1*	Persentase guru TK,SD,SMP,SMA,SMK,dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Belum ada Data	Secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, dan negara berkembang

			kepulauan kecil.
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB	Belum ada Data	Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030 mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan RPJMD Kabupaten Sinjai yang dirumuskan berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Sinjai tahun 2018-2023 dan evaluasi capaian kinerja Dinas Pendidikan sampai tahun 2023.

Strategi dan kebijakan Dinas Pendidikan tahun 2018-2023 disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sinjai. Berdasarkan kajian pada tujuan dan sasaran diatas terlihat beberapa komponen yang dibutuhkan dalam pelayanan pendidikan secara prima antara lain: Pendidik dan Tenaga Kependidikan, sistem pembelajaran, sarana dan parasarana, prestasi siswa serta tata kelola yang transparan dan akuntabel yang terangkum dalam tabel 5.1 di bawah ini

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, strategi dan Kebijakan

<b>Visi: Terwujudnya masyarakat Sinjai yang mandiri, berkeadilan, dan religius melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing</b>			
Misi :			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• MEWUJUDKAN PERAN KABUPATEN SINJAI SEBAGAI PENYELENGGARA PELAYANAN DASAR YANG MEMUASKAN SERTA SEBAGAI PUSAT PELAYANAN PADA BIDANG-BIDANG STRATEGIS</li> <li>• MENINGKATKAN KECERDASAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERIMAN DAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA KUASA</li> </ul>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	Meningkatnya Mutu dan Aksesibilitas Pendidikan Anak Usia Dini	Peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan Non Formal dan Informal	Meningkatkan kualitas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
			Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD
			Meningkatkan Akreditasi Lembaga PAUD
	Meningkatnya Mutu dan Aksesibilitas Pendidikan Dasar	Peningkatan dan Pemerataan kualitas pendidikan dasar	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dasar
			Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar
			Meningkatkan Akreditasi SD dan SMP
	Meningkatnya Mutu dan Aksesibilitas Pendidikan Kesetaraan	Peningkatan dan Pemerataan kualitas pendidikan	Peningkatan kualitas pendidikan kesetaraan
			Meningkatkan kualitas tenaga pendidik pendidikan kesetaraan



		Kesetaraan	Memberikan layanan pendidikan bagi warga yang tidak berkesempatan memperoleh pendidikan formal
			Peningkatan sistem pembelajaran Pendidikan Kesetaraan
	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan dan Pemerataan kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Pendidikan
			Meningkatkan Mutu Luaran Pendidikan Dasar
			Meningkatkan pembinaan dan pengembangan pembelajaran Pendidikan Dasar
			Pemberian Bantuan Beasiswa S1, S2 dan S3 untuk mahasiswa berprestasi

**BAB VI**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**  
**INDIKATIF**

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan tahun 2018-2023 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2018-2023 sebagaimana pada tabel 6.1

**5.1. Rencana Program dan Kegiatan**

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menetapkan program-program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada program pembangunan daerah dalam RPJMD 2014-2018 menurut urusan pemerintahan sebagai berikut :

**A. URUSAN RUTIN SETIAP SKPD**

**Program :**

1. Program Pelayanan Perkantoran
2. Program Pelaporan Kinerja

**B. URUSAN WAJIB BIDANG PENDIDIKAN**

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
3. Program Pendidikan Kesetaraan
4. Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan
5. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator Kinerja Dinas Pendidikan disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Sinjai tahun 2018-2023, Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2023, serta telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang terwujud dalam lima program meliputi:

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
3. Program Pendidikan Kesetaraan
4. Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

4.2.1.1 Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Indikator Kinerja Dinas Pendidikan secara lengkap dapat dipaparkan pada tabel 7.1 di bawah ini:

Tabel 7.1

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD tahun 2018	Capaian Kinerja Program Prioritas dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
			Target	Target	Target	Target	Target	
1	APK PAUD	97,56	100	100	100	100	100	100
2	Kualifikasi Pendidikan Tenaga Pendidik PAUD	Blank	50	55	60	65	70	70
3	Persentase PAUD yang terakreditasi	Blank	60	70	80	90	100	100

4	APK SD/MI	115,84	114	114,5	114,9	115	115,5	115,5
5	APK SMP/M Ts	114,54	115	116	117	118	119	119
6	APM SD/MI	100	100	100	100	100	100	100
7	APM SMP/M Ts	100	100	100	100	100	100	100
8	Pemen uhan Sarana dan Prasara na Pendidikan SD Pemen uhan Sarana dan Prasara na Pendidikan SMP	Blank	75	80	85	90	95	95
9	Persentase SD/MI yang berakreditasi B	Blank	80	85	90	95	99	99
10	Persentase SMP/M Ts berakreditasi B	Blank	80	85	90	95	99	99
11	Persentase Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	99,5	95	96	97	98	100	100

13	Persentase Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	100	99,75	100	100	100	100	100
14	Persentase Guru SD yang Bersertifikasi	69,62	95	96	97	98	100	100
15	Persentase Guru SMP yang Bersertifikasi	78,80	99,75	100	100	100	100	100
16	Angka Melek Huruf	96,42	100	100	100	100	100	100
17	Penduduk Usia 15-59 Tahun yang Melek Huruf	96,42	100	100	100	100	100	100
18	Rerata UASDA SD/MI	Blank	66	67	68	69	70	70
19	Rerata UN SMP/MTs	Blank	67	68	69	70	71	71
20	Mahasiswa yang menyelesaikan Kuliah S1, S2 dan S3	680	100 20 10	100 20 10	100 20 10	100 20 10	100 20 10	100 20 10

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai ini merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan selama periode 2018-2023, mengikuti periode berlakunya RPJMD Kabupaten Sinjai 2018-2023.

Renstra Dinas Pendidikan ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pengembangan Perencanaan, Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan. Renstra Dinas Pendidikan merupakan penjabaran dokumen RPJMD, selanjutnya Renstra Dinas Pendidikan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan yang merupakan rencana tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai selama periode lima tahun, 2018-2023.

Renstra Dinas Pendidikan diterbitkan melalui surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan di dalam pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tugas dan fungsi yang berkaitan dengan Dinas Pendidikan merupakan bagian pencapaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada Bupati dan Wakil Bupati, serta secara moral dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sinjai.